



ICCE REPORT



Membership Proposal for
Implementing Member

International Consortium for Court Excellence (ICCE)

Tegal District Court
Jl. Sutoyo SM No. 9
Tegal 52113
Central Java
Indonesia

Telephone +62 283 356091

Website: www.pn-tegal.go.id

Addressed To : International Consortium for Court Excellence (ICCE)		Contact Person : Liz Richardson			
Summary.		Date. April 2020			
		Approved by <u>Djoni Witanto SH., MH.</u> <i>Chief Judge</i> <i>Tegal District Court</i>			
Included in this report.					
	Draft Report	AMM	PD	C	
Revision	Description	By	Checked	Approved	Date
<p>This report has been prepared by Tegal District Court with all reasonable care and diligence within the requirements and guidance or reference from International Framework of Court Excellence.</p> <p>We disclaim any responsibility to ICCE and others in respect or any matters outside the framework of Court Excellence.</p> <p>This report is confidential to ICCE and we accept no responsibility of whatsoever nature to any third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their ownrisk.</p>		<p>Distribution</p> <p><input type="checkbox"/> Internal</p> <p><input type="checkbox"/> Public</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Confidential</p>			

**I. IMPLEMENTATION OF COURT EXCELLENCE FRAMEWORK/
IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA COURT EXCELLENCE**

1. Court User Satisfaction

Court User Satisfaction, The percent of court users who believe that the court provides procedural justice, i.e., accessible, fair, accurate, timely, knowledgeable, and courteous service.

Formula for the Calculation of Court User Survey Results

Court User Satisfaction

$$CUS = \left(\frac{A + B}{A + B + C + D - E} \right) \times 100$$

A = Strongly Agree

B = Agree

C = Disagree

D = Strongly Disagree

E = Undecided or Unknown

Tools; customized survey forms

Method; survey activities are carried out within a certain timeframe that has been planned, by giving directly to court users who are visiting in court. Appointment of one person responsible for dissemination and ensuring survey participants understand in completing survey form.

1. Kepuasan Pengguna Pengadilan

Kepuasan Pengguna Pengadilan, Persentase pengguna pengadilan yang percaya bahwa pengadilan menyediakan keadilan prosedural, yaitu layanan yang mudah diakses, adil, akurat, tepat waktu, berpengetahuan, dan sopan.

Rumus Perhitungan Hasil Survei Pengguna Pengadilan

Kepuasan Pengguna Pengadilan

$$KPP = \left(\frac{A + B}{A + B + C + D - E} \right) \times 100$$

A = Sangat Setuju

B = Setuju

C = Tidak Setuju

D = Sangat Tidak Setuju

E = Tidak Tahu

Tools; form survei yang sudah disesuaikan Metode; kegiatan survei dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang sudah direncanakan dengan membagikan langsung kepada pengguna pengadilan yang sedang berkunjung di pengadilan. Ditunjuk satu orang yang bertanggung jawab terhadap penyebaran dan memastikan peserta survei mengerti dan paham dalam pengisian formulir survei.

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
1	Mudah untuk menemukan lokasi gedung Pengadilan	39	11	0	0	0
2	Mudah untuk menemukan lokasi setiap ruangan di dalam gedung Pengadilan	16	30	4	0	0
3	Saya merasakan aman di gedung Pengadilan	21	26	3	0	0
4	Saya bisa mendapatkan segala informasi yang saya butuhkan di Pengadilan	23	24	3	0	0
5	Saya diperlakukan dengan sopan dan dihargai	15	32	3	0	0
6	Kebutuhan saya diperhatikan	14	34	2	0	0
7	Kasus saya ditangani dengan baik	18	31	0	0	1
8	Saya dapat menyelesaikan urusan hukum dengan waktu yang masuk akal dan proporsional	17	32	1	0	0
9	Saya diperlakukan sama dengan yang lain tanpa memandang suku, ras, ekonomi, umur, dan jabatan	23	25	2	0	0
10	Pengalaman di pengadilan memberi saya kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengadilan	22	28	0	0	0

Agree	Disagree	Don't know
100%	0%	0%
92%	8%	0%
94%	6%	0%
94%	6%	0%
94%	6%	0%
96%	4%	0%
98%	0%	2%
98%	2%	0%
96%	4%	0%
100%	0%	0%

96% agree / setuju

4% not agree / tidak setuju

0% unknown/ tidak tahu

50 of 50 respondent fullfill the quisioner / respondent mengisi kuis

0 of 50 respondent are absent / respondent tidak mengisi kuis

2. Access Fee

Access Fee, a measure of accessibility defined as the average court fees paid per-case.

Requirement for calculating this measure include the following data elements, the result is the ratio of two elements.

Required data:

- *Total amount of fees collected in 2019 January – 2019 December*
- *Total number of cases registered in 2019 January – 2019 December*

Formula for calculation of access fee :

$$\frac{\text{Total amount of fees collected}}{\text{Total number of cases registered}}$$

2. Biaya Berperkara

Biaya berperkara, ukuran aksesibilitas ini didefinisikan sebagai biaya rata-rata yang dibayarkan per-perkara.

Kebutuhan untuk penghitungan ukuran ini meliputi elemen data berikut, hasilnya adalah rasio dua elemen.

Data yang diperlukan:

- Total jumlah panjar biaya yang terkumpul pada 2019 Januari – 2019 Desember
- Total jumlah kasus terregister pada 2019 Januari – 2019 Desember

Formula penghitungan biaya berperkara:

$$\frac{\text{Total jumlah panjar biaya}}{\text{Total jumlah kasus teregister}}$$

	Periode Januari 2019 – Desember 2019	
Perdata	Total Panjar Biaya	Total Jumlah Perkara
Total panjar biaya yang diterima gugatan	124,570,000.00	80
Total panjar biaya yang diterima permohonan	17,948,000.00	61
Total panjar biaya yang diterima upaya hukum banding	33,936,000.00	12
Total panjar biaya yang diterima upaya hukum kasasi	24,050,000.00	10
total	200,504,000.00	163
biaya rata-rata per/perkara	1,230,085.89	rupiah
Pidana	Total Panjar Biaya	Total Jumlah Perkara
Total panjar biaya yang diterima Pidana Biasa	457,000.00	95
Total panjar biaya yang diterima Pidana Khusus	265,000.00	53
Total panjar biaya yang diterima Pidana cepat	20,000.00	4
Total panjar biaya yang diterima upaya hukum banding	-	2
Total panjar biaya yang diterima upaya hukum kasasi	-	-
total	742,000.00	154
biaya rata-rata per/perkara	4,818.18	rupiah

3. Case Clearance Fee

The number of finalized (outgoing) cases expressed as a percentage of registered/ filed (incoming) cases.

Formula for the calculation of case clearance rate:

$$\%Clearance = \left(\frac{A + B + C}{D + E} \right) \times 100$$

- A = Cases closed within timeperiod
- B = Dispositions of reopened cases within time period
- C = Cases placed in suspended status in time period
- D = Cases opened within timeperiod
- E = Cases reopened within timeperiod

3. Tingkat Penyelesaian Perkara

Nilai dari tingkat penyelesaian perkara dinyatakan sebagai persentase.

Formula dari penghitungan tingkat penyelesaian perkara:

$$\%Tingkat = \left(\frac{A + B + C}{D + E} \right) \times 100$$

- A = Perkara putus dalam jangka waktu tertentu
- B = Disposisi perkara yang dibuka kembali dalam jangka waktu tertentu
- C = Perkara ditempatkan dalam status ditunda dalam periode waktutertentu
- D = Perkara ter-register
- E = Perkara upaya hukum

	Periode 2019 Januari – 2019 Desember	
	Total Jumlah Perkara Ter-register	Total belum putus
Perdata Gugatan	80	15
Perdata Permohonan	61	2
Upaya Banding	12	3
Upaya Kasasi	10	10
Total perdata	163	30
<i>Civil Case Clearance rate /</i> Persentase penyelesaian perkara	93%	
Pidana Biasa	95	2
Pidana Khusus	53	6
Pidana cepat	4	-
Upaya Banding	2	-
Upaya Kasasi	-	-
Total pidana	154	8
<i>Crime Case Clearance rate /</i> persentase penyelesaian perkara	100%	

4. On Time Case Processing

Formula for the Calculation of On-Time Case Processing:

$$\%On\ Time = \left(\frac{A + B}{C}\right) \times 100$$

Definition:

A = Cases closed within the reporting period that do not exceed the time reference points

B = Cases suspended within the reporting period that do not exceed the time reference points

C = All cases closed or suspended within the reporting

Required data:

- Total cases
- Total Cases closed within the reporting period that do not exceed the time reference point
- Cases suspended within the reporting period that do not exceed the time reference points

4. Proses Berperkara Tepat Waktu

Formula penghitungan proses perkara tepat waktu:

$$\%Tepat\ Waktu = \left(\frac{A + B}{C}\right) \times 100$$

Definisi:

A = Jumlah Perkara dengan kekuatan hukum tetap dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan

B = Jumlah Perkara yang ditunda namun belum melewati batas waktu yang ditentukan

C = Jumlah total perkara yang berkekuatan hukum tetap maupun perkara yang ditunda

Data yang dibutuhkan:

- Seluruh perkara masuk terdaftar pada buku register
- Jumlah Perkara selesai berkekuatan hukum dalam periode sesuai peraturan yang berlaku
- Jumlah Perkara tertunda dalam periode sesuai peraturan yang berlaku

Perdata	Total perkara berkekuatan hukum tetap (BHT)	113
	Total perkara yang belum putus	17
	<i>On Time / tepat waktu</i>	92%
Perdana	Total perkara berkekuatan hukum tetap (BHT)	137
	Total perkara yang belum putus	8
	<i>On Time / tepat waktu</i>	95%

5. Pretrial custody

Average of the number of days of detention before trial.

Required data:

- *Classification of cases involving detention before trial*
- *Data when the defendants were arrested before the trial period 2019 January – 2019 December*
- *Data when the defendant began trial period in 2019 January – 2019 December*

Reference from Indonesian law :

According to Article 1 point 21, the Code of Criminal Procedure ("Criminal Code"), detention is the placement of a suspect or defendant in a particular place by the investigator, or the prosecutor or judge to commencement, in terms and in the manner stipulated in this Law , In practice, often the status of prisoners be prolonged due to ongoing investigations in the police is still running. According to Article 7 paragraph (1) letter d Criminal Procedure Code, the investigator (in this case the police) because they are responsible have the authority to make arrests .

Detention itself divided based on interests. Article 20 of the Criminal Procedure Code detention divide it into 3 (three), namely:

- a) For the purposes of the investigation, the investigator or investigators maid on orders authorized investigators to make arrests*
- b) For the purpose of prosecution, the public prosecutor is authorized to make arrests or continued detention*
- c) For the purpose of judges in the trials with the stipulation authorized to make arrests*

The term of detention both in the level of investigation, prosecution and examination in court, high courts and the Supreme Court, under Article 24 to Article 29 of the Criminal Procedure Code to the Criminal Procedure Code, with the following details :

5. Penahanan Sebelum Persidangan

Nilai Rata – rata (average) dari jumlah hari penahanan sebelum persidangan

- Klasifikasi perkara yang melibatkan penahanan sebelum persidangan
- Data kapan terdakwa di tahan sebelum persidangan periode tahun 2019
- Data kapan terdakwa mulai disidangkan periode tahun 2019

Acuan dari hukum Indonesia:

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 KUHP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan
- b) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHP sampai dengan Pasal 29 KUHP, dengan perincian sebagai berikut:

Tingkat Penahanan	Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan	Dasar Hukum	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh penuntut umum	Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut umum, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim pengadilan negeri, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri	Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim pengadilan tinggi, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	50 hari	60 hari

Cases involving pre-trial custody are criminal cases, with a maximum detention of 30 days and suspension of detention 60 days.

Perkara yang melibatkan penahanan sebelum persidangan adalah perkara Pidana, dengan maksimal penahanan hakim adalah 30 hari dan pembantaran penahanan 60 hari.

Performance measure of Pre-Trial Custody as following:

Mengukur kinerja dari Penitipan Pra-Persidangan sebagai berikut :

Keterangan	Maksimal Penahanan Hakim (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHP)	Rata-rata masa Penahanan Hakim (penahanan pra-sidang)
rata-rata masa penahanan hakim perkara pidana biasa	30	7
rata-rata masa penahanan hakim perkara pidana khusus	30	9
rata-rata masa penahanan hakim perkara pidana cepat	30	1

6. Court File Integrity

The number of samples used in the measurement are 50 cases to measure the court file integrity.

6. Integritas Arsip Pengadilan

Untuk mengukur integritas arsip Pengadilan, jumlah sampling yang digunakan pada pengukuran adalah 50 perkara.

3 things that are measured on a court file integrity:

3 hal yang diukur pada court file integrity :

Availability

Definition :

Measuring speed - average of the number of sampling cases (50).

Measurement method; The measurement results obtained in the form of a percentage. The target time can be set by internal, referring to the quality objectives (example: set that search for files in the archive room has a standard 6-minute / case file). The result of the availability are 90% available.

Ketersediaan

Definisi :

Mengukur kecepatan rata – rata dari jumlah sampling perkara (50).

Metoda pengukuran; Hasil pengukuran didapat dalam bentuk prosentase. Target waktu dapat ditetapkan oleh internal, mengacu kepada sasaran mutu (contoh : ditetapkan bahwa mencari file pada ruang arsip memiliki standard 6 menit / berkas perkara). Hasil dari ketersediaan adalah 90% tersedia.

Accuracy:

Definition : Measure the completeness of the file for each case.

Measurement method :

- Check the completeness of files on sampling the number of cases (50 cases / file)
- The results are in the form of percentage
- The result of the measurement are 90% of accuracy

Completeness / Fittings

Definition:

Explain and describe the case of document management procedures, as well as archiving system, and the result are 90% complete.

The total result of court file integrity are 90%

7. Case Backlog

The formula of the calculation of backlog is straight forward

$$\%Backlog = \left(\frac{A}{A + B} \right) \times 100$$

With:

A = Total number of cases in Backlog

B = Inventory

Required Data :

- The total number of cases in one year has been disconnected and has not been concluded, the period 2019 January – 2019 December
- The total number of active cases that have not exceeded the time specified by the applicable regulatory period 2019 January – 2019 December
- The total number of active cases that have passed the time specified by the applicable regulatory period 2019 January – 2019 December
- Data presented in two forms, the first form of the whole matter without classification, the second form in the form of case each classification

Keakuratan

Definisi:

Mengukur kelengkapan berkas untuk setiap perkara.

Metoda pengukuran :

- Mengecheck kelengkapan berkas pada sampling jumlah perkara (50 perkara/berkas)
- Hasilnya dalam bentuk prosentase
- Hasil dari pengukuran adalah 90% akurat

Kelengkapan

Definisi :

Menjelaskan dan mendeskripsikan tata cara pengelolaan dokumen perkara, maupun sistem pengarsipan, dan hasil sampling 90% lengkap.

Hasil keseluruhan pada court file integrity adalah 90%

7. Perkara Tertunda

Formula penghitungan perkara tertunda adalah sebagai berikut

$$\%Backlog = \left(\frac{A}{A + B} \right) \times 100$$

Dengan:

A = Total Perkara Tertunda

B = Total Perkara Ter-register

Data yang dibutuhkan :

- Total jumlah perkara dalam 1 tahun yang sudah diputus dan belum diputus, periode 2019 Januari - 2019 Desember
- Total jumlah perkara aktif yang belum melebihi waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku periode 2019 Januari - 2019 Desember
- Total jumlah perkara aktif yang telah
- Data disajikan dalam bentuk dua bentuk, bentuk pertama seluruh perkara tanpa klasifikasi, bentuk kedua dalam bentuk perklasifikasi perkara

Total cases beyond the settlement period /total perkara melebihi jangka waktu penyelesaian	0
Total registered criminal and civil cases /total register perkara pidana dan perdata	293
Case backlog / persentase perkara tertunda	0%

8. Trial Date Certainty

Formula for the calculation of Trial Date Certainty:

Cases with no more than X trial settings

$$= \left(\frac{A}{B}\right) \times 100$$

Definition:

X = Number of prescribed or target trial settings

A = Number of cases with no more than the prescribed or target settings

B = Total number of closed trial cases

Measurement method:

Determine the maximum target amount of a trial date can be determined

Required Data :

- *On initial plan is determined by the trial judge each case the period of 2019 January – 2019 December*
- *The actual date the hearing each case the period of 2019 January – 2019 December.*
- *The number of times to do the trials in each case the period 2019 January – 2019 December*

8. Kepastian Waktu Persidangan

Formula penghitungan kepastian waktu persidangan:

Perkara yang tidak lebih dari X trial

$$= \left(\frac{A}{B}\right) \times 100$$

Definisi:

X = Jumlah sasaran waktu penyelesaian yang ditentukan atau target

A = Jumlah perkara yang tidak lebih dari target

B = Jumlah perkara yang telah putus

Metode penghitungan :

Menentukan target jumlah maksimal tanggal persidangan..

Data yang dibutuhkan :

- **Tanggal Rencana awal persidangan yang ditentukan oleh hakim setiap perkara periode 2019 Januari - 2019 Desember.**
- **Tanggal aktual persidangan setiap perkara periode 2019 Januari - 2019 Desember.**
- **Jumlah berapa kali dilakukan persidangan pada setiap perkara periode 2019 Januari - 2019 Desember.**

Perdata	sasaran jumlah persidangan	total perkara ter-register yang sudah putus	jumlah persidangan yang melewati sasaran jumlah persidangan	persentase persidangan yang sesuai dengan sasaran jumlah persidangan
Total perkara gugatan	15	65	4	93%
Total perkara permohonan	4	59	1	98%
Pidana	sasaran jumlah persidangan	total perkara ter-register yang sudah putus	jumlah persidangan yang melewati sasaran jumlah persidangan	persentase persidangan yang sesuai dengan sasaran jumlah persidangan
Total Perkara Pidana Biasa	6	93	24	74%
Total Perkara Pidana Khusus	9	47	1	97%
Total Perkara Pidana cepat	1	4	0	100%

9. Court Employee Engagement
Formula for the Calculation of Court
Employee Engagement

Court Employee Engagement

$$= \left(\frac{A + B}{A + B + C + D - E} \right) \times 100$$

A = Strongly Agree
B = Agree
C = Disagree
D = Strongly Disagree
E = Undecided or Unknown

Tools:
Form Survey (annex 2)

9. Komitmen Petugas Pengadilan
Formula untuk penghitungan Komitmen Petugas
Pengadilan

Court Employee Engagement

$$= \left(\frac{A + B}{A + B + C + D - E} \right) \times 100$$

A = Sangat Setuju
B = Setuju
C = Tidak Setuju
D = Sangat Tidak Setuju
E = Undecided atau tidak diketahui

Alat:
Form Survey (lampiran 2)

Survei Keterlibatan Karyawan Pengadilan

Mohon luangkan beberapa menit untuk menyelesaikan survei singkat ini .
 Tanggapan dan Opini Anda akan membantu pengadilan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.
 Semua tanggapan dan opini bersifat rahasia, kami tidak perlu mengetahui nama dan jabatan Anda .
 Terima kasih untuk bantuannya.

Petunjuk:

Silahkan menanggapi pernyataan di bawah ini berdasarkan pengalaman Anda di gedung pengadilan. Untuk setiap pernyataan dibawah ini, lingkari **Huruf** yang paling menggambarkan setuju atau tidak setuju. Lingkari hanya satu **Huruf** untuk setiap pernyataan.

Jika pernyataan tidak sesuai untuk Anda , silakan cek di kotak " **tidak tahu**" di kolom terakhir .

		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
1	Saya diberi informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi saya.	A	B	C	D	E
2	Saya mengerti apa yang diharapkan dari saya.	A	B	C	D	E
3	Saya memiliki sumber daya (bahan, peralatan, perlengkapan, dll) yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik.	A	B	C	D	E
4	Saya mampu melakukan yang terbaik setiap hari.	A	B	C	D	E
5	Komunikasi dalam divisi/departemen/unit saya baik .	A	B	C	D	E
6	Pada bulan lalu , saya diakui dan dipuji karena melakukan pekerjaan dengan baik.	A	B	C	D	E
7	Seseorang di tempat kerja saya, memperlakukan saya sebagai pribadi.	A	B	C	D	E
8	Saya memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat saya tentang bagaimana hal tersebut dilakukan di divisi saya .	A	B	C	D	E
9	Pengadilan ini dihormati di masyarakat.	A	B	C	D	E
10	Rekan kerja saya bekerja sama dengan baik .	A	B	C	D	E
11	Saya dianjurkan untuk mencoba cara-cara baru dalam melakukan sesuatu .	A	B	C	D	E
12	Saya memahami hubungan antara pekerjaan yang saya lakukan dan misi dan tujuan dari Pengadilan ini.	A	B	C	D	E
13	Kondisi kerja dan lingkungan memungkinkan saya untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik.	A	B	C	D	E
14	Saya merasa dihargai oleh atasan saya berdasarkan pengetahuan dan kontribusi untuk departemen saya , satuan atau divisi saya .	A	B	C	D	E
15	Aku merasa bebas untuk berbicara apa yang ada di pikiran saya .	A	B	C	D	E
16	Pada bulan lalu , seseorang di tempat kerja telah berbicara kepada saya tentang kinerja saya.	A	B	C	D	E
17	Saya menikmati datang untuk bekerja.	A	B	C	D	E
18	Rekan kerja saya peduli tentang kualitas layanan dan program yang kami berikan.	A	B	C	D	E
19	Saya diperlakukan dengan hormat.	A	B	C	D	E
20	Saya bangga bahwa saya bekerja di Pengadilan ini.	A	B	C	D	E

Respondents of this survey is confidential, the survey results put in the box immediately after equipped.

Responden survei ini bersifat rahasia, hasil survey dimasukkan ke dalam kotak langsung setelah selesai di lengkapi.

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu	agree	disagree	unknown
1	Saya diberi informasi tentang hal-hal yang mempengaruhisaya.	8	17	13	0	4	60%	31%	10%
2	Saya mengerti apa yang diharapkan dari saya.	19	20	0	0	3	93%	0%	7%
3	Saya memiliki sumber daya (bahan, peralatan, perlengkapan, dll) yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik	23	18	1	0	0	98%	2%	0%
4	Saya mampu melakukan yang terbaik setiap hari.	12	30	0	0	0	100%	0%	0%
5	Komunikasi dalam divisi/departemen/unit saya baik.	27	13	1	0	1	95%	2%	2%
6	Pada bulan lalu, saya diakui dan dipuji karena melakukan pekerjaan dengan baik.	6	22	8	1	5	67%	21%	12%
7	Seseorang di tempat kerja saya, memperlakukan saya sebagai pribadi.	2	20	14	2	4	52%	38%	10%
8	Saya memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat saya tentang bagaimana hal tersebut dilakukan didivisi saya .	6	31	2	0	3	88%	5%	7%
9	Pengadilan ini dihormati dimasyarakat.	27	13	1	0	0	98%	2%	0%
10	Rekan kerja saya bekerja sama dengan baik.	24	18	0	0	0	100%	0%	0%
11	Saya dianjurkan untuk mencoba cara-cara baru dalam melakukan sesuatu.	20	21	1	0	0	98%	2%	0%
12	Saya memahami hubungan antara pekerjaan yang saya lakukan dan misi dan tujuan dari Pengadilanini.	24	18	0	0	0	100%	0%	0%
13	Kondisi kerja dan lingkungan memungkinkan saya untuk melakukan pekerjaan saya denganbaik.	19	22	1	0	0	98%	2%	0%
14	Saya merasa dihargai oleh atasan saya berdasarkan pengetahuan dan kontribusi untuk departemen saya , satuan ataudivisi saya .	19	20	2	0	1	93%	5%	2%
15	Aku merasa bebas untuk berbicara apa yang ada di pikiran saya .	12	24	4	0	2	86%	10%	5%
16	Pada bulan lalu , seseorang di tempat kerja telah berbicara kepada saya tentang kinerjasaya.	12	22	0	0	8	81%	0%	19%
17	Saya menikmati datang untuk bekerja.	31	10	0	0	1	98%	0%	2%
18	Rekan kerja saya peduli tentang kualitas layanan dan program yang kami berikan.	15	27	0	0	0	100%	0%	0%
19	Saya diperlakukan denganhormat.	14	25	2	0	1	93%	5%	2%
20	Saya bangga bahwa saya bekerja di Pengadilan ini.	33	9	0	0	0	100%	0%	0%

Court of employee engagement/
Komitmen petugas pengadilan

90% agree / setuju

6% not agree / tidak setuju

4% unknown/ tidak tahu

42 of 48 respondent fulfill the
quisioner / respondent mengisi kuis

6 of 48 respondent are absent /
respondent tidak mengisi kuis

**10. Compliance with Court Orders-
Collection of Fines, Fees, and Other
Monetary Penalties**

**10. Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan- Koleksi
Denda, Biaya, dan Sanksi Moneter Lainnya
Data yang digunakan:**

$$\frac{\text{Total amount of monetary obligations paid and collected}}{\text{Total amount of monetary obligations imposed}}$$

$$\frac{\text{Jumlah total kewajiban moneter dibayar dan dikumpulkan}}{\text{Total kewajiban moneter yang diberlakukan}}$$

Data used :

- *The total money of the order to pay the fees, fines and other penalties ordered shapes / decided during the period in 2019 January – 2019 December .*
- *Total cash received from the order to pay the fees, fines and other penalties collected form 2019 January – 2019 December period.*
- *Both data are presented in two forms, the first form of global / holistic, second separated per classification case*

- Total uang dari perintah membayar biaya, denda dan bentuk penalti lainnya yang diperintahkan/diputuskan selama periode 2019 Januari - 2019 Desember.
- Total uang yang diterima dari perintah membayar biaya, denda dan bentuk penalti lainnya yang dikumpulkan periode 2019 Januari - 2019 Desember.
- Kedua data tersebut disajikan dalam dua bentuk, bentuk pertama secara global/menyeluruh, yang kedua dipisah per klasifikasi perkara.

The court does not have the obligation to oversee and ascertain whether fines have been paid by defendant, the main tasks are to hear the case.

Pengadilan tidak memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan apakah Pidana Denda telah dipenuhi oleh terdakwa, tugas pokok tersebut berada pada Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum.

The Court only has the amount of information and data in the form of criminal fines have been imposed by the sentencing judge.

Pengadilan hanya memiliki informasi berupa besaran Pidana Denda yang telah dijatuhkan vonis oleh Hakim.

According to data from registered case, the total fines in 2019 January – 2019 December are Rp. 38.595.400.000,00.

Total Pidana Denda menurut data Perkara Terregister pada 2019 Januari - 2019 Desember berjumlah Rp.13.049.000.000,00

The total execution of money payment In the private cases in 2019 January – 2019 December are Rp. 935.425.002,00.

Total eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara perdata pada 2019 Januari - 2019 Desember berjumlah Rp.935.425.002,00

11. Cost Per Case

Cost Per Case is a useful indicator of a court's efficient and effective use of its resources. It helps court managers forge a direct connection between how much is spent and what is accomplished.

11. Biaya Berperkara

Biaya per-perkara adalah indikator yang berguna untuk penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif oleh pengadilan. Ini membantu ketua pengadilan memadu antara berapa banyak yang dikeluarkan dan apa yang telah dicapai.

Data used:

- *Distributed expenditures*
- *Disposition by case type*

Formula:

$$\frac{\text{Distributed expenditures}}{\text{Disposition}}$$

Data yang digunakan:

- *Pengeluaran terdistribusi*
- *Disposisi menurut klasifikasi perkara*

Formula:

$$\frac{\text{Pengeluaran terdistribusi}}{\text{Disposisi menurut klasifikasi perkara}}$$

Case Type / Klasifikasi Perkara	Distributed Expenditures / Total Biaya Perkara	Registered Case / Total Register Perkara	Cost per-Case / Biaya per-Perkara
Perdata Gugatan	124,570,000.00	80	1,557,125.00
Perdata Permohonan	17,948,000.00	61	294,229.50
Pidana Biasa	457,000.00	95	4,810.00
Pidana Khusus	265,000.00	53	5,000.00
Pidana cepat	20,000.00	4	5,000.00

4. Improvement Plan

1. Our Court Registrars will improve their service by completing their court proceeding report in two days at the latest after the last session so they will be able to deliver to the Judge panel prior to make court decision.

a. We have already implemented this and it is clearly seen and can be viewed attentively from our SIPP (Case Tracking Information system) at Our Court Website.

b. Our Head of Court Registrar and Deputy Court Registrar will always monitor the compliance of all the court registrar in completing their court report.

2. We will continue our one day service toward all court users especially those who require an official letter.

a. We have implemented this

b. Head of Legal Section will be monitoring the implementation of this improvement.

3. We will support the Judges and Court Staffs who wish to take further study and to develops his or her capability.

a. We have implemented this according to the regulation, the approval has been given to those who wish to take further studies in the same city located to the court.

b. The Head of Human Resources and Organization section under supervision from the court secretary will be monitoring this improvement continually.

4. I publish the client's name who has contributed through his or her suggestion or useful opinion, as a form of reward to our client.

a. We've made a plan that in the next 3 (three) months that this plan will be implemented and the publication will be in each semester or every 6 (six) months.

b. The Head of Human Resources and Organization section in coordinating with the Head of Planning, IT and Report section together under supervision from court secretary will be monitoring the future implementation.

5. We will implement the better queue system so our court may improve our court performance.

a. We've made a plan that in the next 3 (three) months that this plan will be implemented. We will provide a digitalized queueing system to improve the ongoing manual system.

b. The Head of General Affair and Finance section under court secretary's supervision will be monitoring the implementation of this plan.

6. To use effectively our one-stop integrated services in order to increase clients satisfaction.

a. We have implemented this plan;

b. The Head of Court Registrar and Court Secretary will keep on monitoring the implementation of this ongoing improvement.

7. To allocate from our court budget in order to improve some facilities such as more newspaper and running text that will be very useful to the clients, in this case, all the court visitor.

a. We have implemented for our programs socialization and will be improved by the using of TV Monitor in the next year court budget.

b. The Head of General Affair and Finance section under Court Secretary's supervision will be monitoring the implementation of this plan.

8. We will conduct a survey about court user satisfaction according to the IFCE's Global Measures and then will subsequently report to the ICCE committee.

a. We've made a plan that in the next 3 (three) months that this plan will be implemented

b. The Head of Legal Section under Head of Court Registrar will be monitoring the implementation of this plan.

9. Our resolved cases will be put in the inventory based on the serial number and the year of judgment, to replace the previous system based on the qualification.

Our head of Court Registrar and Head of Legal Section will be monitoring this plan.

10. We will publish the clients' name who has contributed through his or her suggestion as a form of reward to our client in every six months (every semester).

The head of Human Resources and Organization section in coordinating with the Head of Planning, IT and Report section together under the supervision from court secretary will be monitoring this improvement plan.

II. In our court, there is a position called Management Representative and its member who supervised the implementation of Standard of Accreditation of Quality Control, part of Supreme Court's imperative scheme to develop inner Reformation of Bureaucracy. So the same body will be monitoring our progress in implying our icce improvement plans.